



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

djpt  
bersinergi

#2023  
HMP THRIVE

# Laporan Kinerja

## Tahun 2023



Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

# LEMBAR PENGESAHAN



## LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2023  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Cirebon, 15 Januari 2024

*Disetujui oleh:*

Penanggung Jawab,  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Kejawanan

*Disusun oleh:*

Ketua Tim,  
Kepala Subbagian Umum



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Mohamad Yusuf Santoso

## KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2023 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2023, namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun 2023.

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

## **1. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. SDM PPN Kejawanan
- 1.6. Sistematika Penyajian

## **2. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap
- 2.2. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
- 2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

## **3. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

## **4. PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

## **LAMPIRAN**

- Perjanjian Kinerja TA 2023
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja TA 2023
- Rencana Aksi Tahun 2023

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp19.260.884.000,- yang terealisasi sebesar Rp19.125.116.017,- atau 99,30% dari total pagu Tahun 2023. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 116,68%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerja pada Gambar 1).



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Tahun 2023 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagai berikut :

1. IK1 – Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Juta Rupiah)
2. IK2 – Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)
3. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
4. IK4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
5. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
6. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
7. IK7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
8. IK8 – Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IK9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

11. IK11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK12 – Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
15. IK15 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
17. IK17 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

# BAB I . PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

## 1.2. Gambaran Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Selain itu, Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada Fasilitas Pokok seperti Penahan Gelombang, Dermaga, Kolam dan Alur Pelayaran, Rambu Navigasi, Jalan Masuk dan Jalan Komplek, TPI dan lain-lainnya. Setelah melewati tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasionalkan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuriana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon diupayakan untuk mewujudkan harapan, menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Udang, Pusat kegiatan perikanan di Pantai Utara bagian Timur Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Kota Cirebon cukup mempunyai potensi untuk mewujudkan harapan tersebut, baik dilihat dari segi potensi perikanan maupun dari segi pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, perhubungan/transportasi, telekomunikasi, listrik, Air PDAM, sumber daya manusia dan lain-lain.



Gambar 2. Master Plan PPN Kejawanan

### 1.3. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;

9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### 1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Subbagian Umum, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

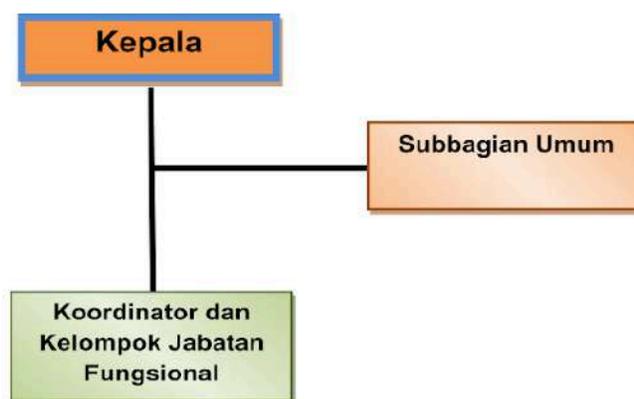
- dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggungjawab untuk melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha bertanggungjawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti

sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha;

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan

fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Pertama), Pranata Keuangan APBN (Mahir), Analis Kepegawaian, Pranata Humas (Terampil), Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) serta Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T).

### PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Gambar 3. Struktur Organisasi PPN Kejawanan

### 1.5. SDM PPN KEJAWANAN

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di dukung oleh 73 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 46 orang, PPPK sebanyak 17 orang dan Pramubakti sebanyak 10 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset

untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	- Dukungan Manajerial	-	3	5	-	8
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	4	3	-	7
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	1	1	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	1	5	-	6
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	5	-	5
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	4	-	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	6	-	6
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	7	-	-	7
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	1	-	-	1
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	1
8.	Pegawai Pramubakti	10	-	-	-	10
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>73</b>

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Dukungan Manajeril	-	-	3	-	5	-	-	8
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	2	-	5	-	-	7
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	-	-	2	-	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	4	-	2	-	-	6
6.	Jabatan Fungsional Tertentu								
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	5	-	-	-	-	5
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	1	3	-	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	6	-	-	-	-	6
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	7	-	-	7
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	3	1	6	-	-	10
	<b>Jumlah</b>	-	1	38	4	30	-	-	73

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1.	Kepala Pelabuhan	1	1	-
2.	Kepala Subbagian Umum	1	1	-
	- Dukungan Manajerial	8	6	2
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	7	7	-
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	1	-
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	3	3	-
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	1	-
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	6	6	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Pranata Komputer (Muda)	1	1	-
	- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli (Pertama)	1	1	-
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	5	2	3
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	4	4	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	1	1	-
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	2	1	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	1	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	1	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	6	4	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	7	6	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	1	1	-
	- Arsiparis Ahli Pertama	1	1	-
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	-
8.	Pegawai Pramubakti	10	9	1
<b>Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin</b>		<b>73</b>	<b>58</b>	<b>15</b>
<b>Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin</b>		<b>100,00</b>	<b>79,45</b>	<b>20,55</b>

## 1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Kejawatanan Tahun 2023 sebagai berikut:



### 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan.

### 2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan

### 3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2023.

### 4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

## **5. BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## **6. LAMPIRAN**

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

# BAB II . PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap

- Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Visi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.
- Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:
  1. **Misi 1.** Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan Misi;
  2. **Misi 2.** Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;
  3. **Misi 4.** Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan;
  4. **Misi 8.** Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap.

## VISI DAN MISI PPN KEJAWANAN

***“Terwujudnya Pusat Usaha Perikanan Yang Berdaya Saing dan Terintegrasi Bertaraf Internasional”***

Sebagai “Pusat Usaha Perikanan” artinya bahwa wilayah PPN Kejawanan merupakan pusat bagi kegiatan perikanan dari hulu (perikanan tangkap) sampai hilir (pengolahan dan pemasaran ikan).

“Yang Berdaya Saing” artinya produk perikanan di PPN Kejawanan mempunyai mutu yang dapat bersaing pada pasar domestik, dan internasional.

“Dan Terintegrasi” artinya seluruh aktivitas usaha perikanan saling terkait dan mendukung (mewujudkan KKP mini) termasuk aktivitas pendukung non perikanan untuk mengoptimalkan potensi PPN Kejawanan.

“Bertaraf Internasional” artinya seluruh aktivitas dan usaha di PPN Kejawanan memiliki standar Internasional.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender;
2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan;
3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure;
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

## 2.2. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang diturunkan dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Juta Rupiah)	4.308,68
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Ton)	4.200
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Nilai)	83

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	85
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	25
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,01
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	50
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	10
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,07
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	75
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	93
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	85
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	77,5
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	93,75
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	82
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	88,21		

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk Tahun 2023 dapat dikomposisikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
<b>1.</b>	<b>2337</b>	<b>Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan</b>	<b>250.620.000</b>	<b>249.644.537</b>	<b>99,61</b>
	ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	227.000.000	226.429.537	99,75
	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	10.420.000	10.406.000	99,87
	PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	13.200.000	12.809.000	97,04
<b>2.</b>	<b>2338</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>	<b>5.034.831.000</b>	<b>4.988.789.778</b>	<b>99,09</b>
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	2.444.449.000	2.424.668.361	99,19
	BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	615.000.000	613.826.140	99,81
	RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1.775.382.000	1.752.285.522	98,70
	RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)	200.000.000	198.009.755	99,00
<b>3.</b>	<b>2339</b>	<b>Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.996.826</b>	<b>99,92</b>
	QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	4.000.000	3.996.826	99,92
<b>4.</b>	<b>2341</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>	<b>30.490.000</b>	<b>30.193.022</b>	<b>99,03</b>
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	30.490.000	30.193.022	99,03
<b>5.</b>	<b>2342</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</b>	<b>13.940.943.000</b>	<b>13.852.491.854</b>	<b>99,37</b>
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	50.000.000	49.141.514	98,28
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	13.960.000	12.364.000	88,57
	EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	12.211.183.000	12.138.408.845	99,40
	EBB.951	Layanan Sarana Internal (Unit)	1.147.400.000	1.141.006.000	99,44
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	20.500.000	20.424.533	99,63
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	59.000.000	57.976.138	98,26
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	34.000.000	33.853.194	99,57
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	84.900.000	80.696.630	95,05
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	320.000.000	318.621.000	99,57

### 2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif Internal Process dan Learning and Growth yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini :

Tabel 6. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Matriks Capaian Triwulan IV  
 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 TAHUN 2023

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Keterangan		
							Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%			
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Juta Rupiah)	Evaluasi PNBP di Pelabuhan Perikanan	25.400.000,00	Rp. Juta	4.308,68												Tercapai		
				Layanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	143.056.000,00																
				Sosialisasi Penerapan Aplikasi PELARI dan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi SIJAKa	17.700.000,00																
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Layanan data statistik kelautan dan perikanan di pelabuhan	13.960.000,00	Ton	4.200	500	528,51	105,70	1200	1.505,69	125,47	2200	3.158,72	143,58	4.200	5.619,85	133,81	Tercapai	
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	615.000.000,00																
				Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat dan PP Perintis untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.775.382.000,00																
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang bertdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Pengelolaan Pengusahaan dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	14.516.000,00	Persen	100									100	100	100	Tercapai		
				4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	145.600.000,00	Nilai	83	80	89,55	111,95	80	89,83	112,29	80	91,08	113,85	83	90,12	108,58

		Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	47.045.000,00																		
		Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan	19.780.000,00																		
		Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	436.670.000,00																		
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)	4.000.000,00																		
	5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	30.490.000,00	Persen	85												85	98,4	115,76	Tercapai
			Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	12.880.000,00																	
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional	200.000.000,00	Persen	25											25	32,05	128,20	Tercapai
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	1.565.142.000,00	Nilai	30,01											30,01	87,87	292,80	Tercapai
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan	227.000.000,00	Kapal	50											50	188	376,00	Tercapai
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan - Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan	10.420.000,00	Persen	10											10	14,36	143,60	Tercapai

		Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan - Sosialisasi dan asistensi pelayanan buku pelaut bagi awak kapal Perikanan dan FPKL	13.200.000,00																			
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	50.000.000,00	Nilai	75,07											75,07	80,94	107,82	Tercapai	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan	69.700.000,00	Persen	75	75	100	133	75	100	133	75	100	133	75	100	133,33			Tercapai
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	34.000.000,00	Nilai	93											93,00	98,69	106,12	Tercapai	
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Layanan Manajemen SDM	20.500.000,00	Indeks	85				80	81,17	101,46					85	90,94	106,98	Tercapai	
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	320.000.000,00	Persen	77,5											77,5	89,69	115,73	Tercapai	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin	132.050.000,00																	
				Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	304.650.000,00																	
				Terperutuhnya Kebutuhan Listrik, Telekomunikasi, Air dan Lainnya	1.371.555.000,00																	
				Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	118.470.000,00																	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan	142.111.000,00																	
				Pengadaan Tenaga Outsourcing Jasa Satpam, Tenaga Kebersihan	2.274.625.000,00																	
				Pemeliharaan Jaringan Air Kotor	16.920.000,00																	
				Pemeliharaan Irigasi	23.970.000,00																	
				Pengadaan sarana perkantoran	1.147.400.000,00																	
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Kegiatan Laporan Keuangan dan BMN	15.200.000,00	Persen	77,5											77,5	87,5	112,90	Tercapai	
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.627.355.000,00	Nilai	93,75				82	95,31	116,23					93,75	95,69	102,07	Tercapai	
					1.196.477.000,00																	

		Terlaksananya Penyampaian Surat - Surat dan Dokumen Dinas	3.000.000,00										
17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	59.000.000,00	Nilai	82					82	84,89	103,52	Tercapai
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Review SOP Standar Pelayanan Pengukuran SKM	16.360.000,00	Indeks	88,21					88,21	90,43	102,52	Tercapai

Cirebon, 12 Januari 2024



# BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut :

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	4.308,68	8.507,99	120
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	4.200	5.619,85	120
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	100	100	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	83	90,12	108,58
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	85	98,40	115,76
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	25	32,05	120
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	30,01	87,87	120
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	50	188	120

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	Persen	10	14,36	120
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Nilai)	Nilai	75,07	80,94	107,82
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Persen)	Persen	75	100	120
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Nilai)	Nilai	93	98,69	106,12
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Indeks)	Indeks	85	90,94	106,99
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Persen)	Persen	77,5	89,69	115,73
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Persen)	Persen	77,5	87,50	112,90
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Nilai)	Nilai	93,75	95,69	102,07
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Nilai)	Nilai	82	84,89	103,52
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (Indeks)	Indeks	88,21	90,43	102,52

Adapun pembahasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

### 3. 1. 1. Sasaran Kegiatan 1 - Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

#### IKU 1 - Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Juta Rupiah)

Indikator Penerimaan PNBPN merupakan indikator penerimaan negara bukan pajak pada PPN Kejawanan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBPN yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBPN yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA dan non SDA. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Kejawanan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh Tahun 2023. Capaiannya berupa nilai realisasi nilai PNBPN fungsional dan umum sampai dengan akhir tahun berjalan (kumulatif).

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja “Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan” Tahun 2023

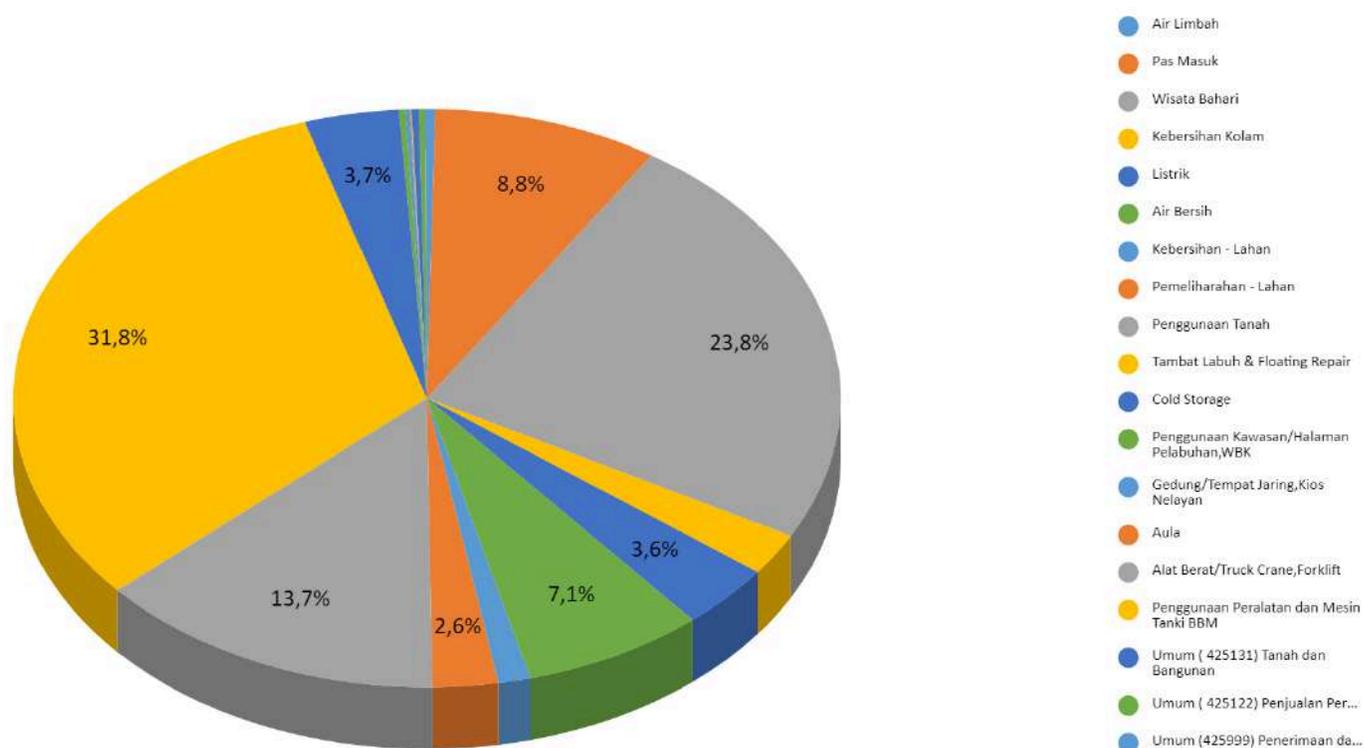
SK 1		Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 1		Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan								
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
2.490	5.739,08	3.015	4.339,07	4.591,14	4.308,68	8.507,99	197,46	3.563	238,79	

#### a. Target dan Realisasi

Sampai dengan Triwulan IV 2023, Nilai PNBPN di PPN Kejawanan tercapai sebesar Rp8.507,99 juta atau persentase capaiannya sebesar 197,46% dari target Tahun 2023.

Capaian tersebut diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Cold Storage, Gedung/Tempat Jaring, Kios Nelayan, Aula, Alat Berat/Truck Crane, Forklift, serta Penjualan Peralatan dan Mesin.

### Capaian PNBП Tahun 2023



Nilai PNBП tertinggi pada pelayanan tambat labuh dan floating repair sebesar Rp2.702.959.417 ,- atau sebesar 31,8% dari total PNBП pada Tahun 2023.

Tabel 9. Rincian Nilai PNBП Non SDA di PPN Kejawanan Tahun 2023

NO.	Bulan	Nilai Penerimaan PNBП Non SDA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)
1.	Januari	745.695.157
2.	Februari	550.224.571
3.	Maret	1.024.588.868
4.	April	407.736.710
5.	Mei	1.174.408.170
6.	Juni	553.448.588
7.	Juli	680.966.247
8.	Agustus	819.236.719
9.	September	595.275.915
10.	Oktober	661.560.975
11.	November	521.278.445
12.	Desember	773.574.813
Total		8.507.995.178

#### b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,33% - 50,02%. Peningkatan PNBP pada triwulan Tahun 2023 didukung oleh perubahan tarif layanan yang meningkat berdasarkan PP 85 Tahun 2021 serta meningkatnya pengunjung Wisata Bahari Kejawanan.

#### c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian Tahun 2023 sebesar 238,79%.

#### d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

#### e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)	Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)
4.308,68	8.507,99	197,46	415	1.221,33	294,30

Capaian indikator kinerja "Penerimaan PNBP Non SDA" bila dibandingkan dengan PPN Pekalongan, capaian di PPN Kejawanan lebih besar dengan realisasi Rp8.507.995.178,00, namun bila dibandingkan persentase realisasinya Nilai PPN Pekalongan lebih besar dikarenakan target PNBP di PPN Pekalongan hanya sebesar Rp.415 juta sedangkan PPN Kejawanan sebesar Rp4.308,68 Juta.

#### f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian Nilai PNBP di PPN Kejawanan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Cold Storage, Gedung/Tempat Jaring, Kios Nelayan, Aula, Alat Berat/Truck Crane, Forklift, serta Penjualan Peralatan dan Mesin.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian PNBP di PPN Kejawanan adalah perubahan cuaca dan tren penangkapan. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pencapaian PNBP khususnya untuk pelayanan tambat labuh, floating repair dan kebersihan kolam.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan” Tahun 2023 yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki serta meningkatkan fasilitas layanan di PPN Kejawanan.

## g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan” Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan	197,46%	186.156.000	184.787.908	367.586.682	182.798.774
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				98,20%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{98,20\%}{20} \times 50 \right)$				295,49%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp184.787.908,- atau 99,27% dari total anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 98,20% dan nilai efisiensi sebesar 295,49%.

### 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 1 – Nilai PNBP di PPN Kejawanan, didukung oleh 32 (tiga puluh dua) orang SDM. Dengan pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP ada 13 (tiga belas) pelayanan. Terdapat SDM yang merangkap dalam pelaksanaan pelayanan jasa. Petugas pas masuk harian ada 5 (lima) orang, yang bertugas dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Untuk petugas pelayanan jasa air 2 (dua) orang dan listrik 2 (dua) orang, petugas pelayanan penggunaan tanah dan bangunan 1 (satu) orang, petugas pelayanan penyimpanan ikan di *cold storage* 2 (dua) orang, petugas pelayanan sewa

peralatan dan alat berat 2 (dua) orang, petugas pelayanan jasa tambat labuh 1 (satu) orang, petugas pas harian wisata 4 (empat) orang, petugas pelayanan penggunaan halaman wisata bahari 1 (satu) orang, Petugas pengolahan air limbah 2 (dua) orang, Petugas pelayanan penggunaan ruang pertemuan 1 (satu) orang, Petugas penggunaan kawasan 1 (satu) orang.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

#### **h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawan” yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi kegiatan:

- Pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan
- Pelaksanaan Perusahaan Pelabuhan Perikanan
- Pengembangan dan peningkatan fasilitas di kawasan Wisata Bahari Kejawan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV terkait dengan pencapaian indikator “Penerimaan PNBP di PPN Kejawan” yaitu koordinasi terkait perizinan, sosialisasi perusahaan di pelabuhan perikanan, monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan, serta peningkatan fasilitas untuk menunjang kegiatan di Wisata Bahari Kejawan.

#### **3. 1. 2. Sasaran Kegiatan 2 - Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan meningkat**

**IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)**

Indikator Kinerja Utama “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” merupakan hasil perhitungan dari jumlah volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan selama triwulan pada tahun berjalan. Realisasi capaian IKU ini dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Capaian s/d triwulan IV Tahun 2023 adalah sebanyak 5.619,85 Ton atau 133,81% dari target Tahun 2023 sebesar 4.200 Ton.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

SK 2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat								
IK 2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
8.026	8.844,53	4.421,73	6.224,25	4.446,88	4.200	5.619,85	133,81	4.500	124,88

### a. Target dan Realisasi

Dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 4.200 ton, jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Kejawanan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 tercapai sebesar 5.619,85 ton atau persentase capaiannya 133,81%. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap bulannya sebagai berikut :

Tabel 13. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

NO.	Bulan	Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan (Ton)
1.	Januari	213,02
2.	Februari	62,53
3.	Maret	252,96
4.	April	501,83
5.	Mei	29,89
6.	Juni	445,46
7.	Juli	697,66
8.	Agustus	510,17
9.	September	445,18
10.	Oktober	248,79
11.	November	888,86
12.	Desember	1.316,06
Total		5.619,85

### b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel volume produksi di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut: Realisasi volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap tahunnya mengalami pergerakan yang cenderung fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kapal domisili yang mengalami perubahan fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, trend penangkapan ikan yang berubah-ubah setiap tahunnya, durasi penangkapan ikan yang berubah, perubahan iklim yang semakin tidak menentu, dll. Faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah trip suatu kapal ketika beroperasi melakukan penangkapan ikan di fishing ground. Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, volume produksi juga mengalami perubahan yang sifatnya fluktuatif.

### c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan triwulan III Tahun 2023 baru mencapai **133,81%**.

### d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional

### e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Volume produksi perikanan tangkap Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
4.200	5.619,85	133,81	3.708	12.736,7	343,50

Jika dibandingkan dengan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Pekalongan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan jauh lebih kecil dengan selisih 7,116,85 ton atau 209,6 %.

### f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Meskipun target volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 tercapai dan bahkan melampaui dari target yang telah ditentukan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kapal domisili yang fluktuatif bahkan cenderung menurun, trend musim ikan yang semakin tidak terkirakan, trend pelayaran yang semakin panjang, kenaikan harga BBM, dan faktor alam/cuaca serta faktor faktor tidak terduga lainnya. Dalam prosesnya, PPN Kejawanan melakukan beberapa terobosan seperti melaksanakan pencatatan produksi secara digital, efisien dan transparan melalui aplikasi bantu pencatatan. PPN Kejawanan juga memaksimalkan pemanfaatan timbangan digital yang turut serta membantu kinerja petugas di lapangan.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu hambatan yang ditimbulkan untuk mencapai IKU tersebut lebih kepada hambatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak bisa dihindari seperti alam dan cuaca, trend penangkapan yang semakin lama karena semakin sulit mendapatkan ikan, musim ikan yang semakin tidak terprediksi, dll.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki seperti timbangan digital, fasilitas penunjang kegiatan pembongkaran ikan (palet timbangan, selasar portabel, dll) aplikasi bantu pencatatan pendaratan ikan, sumber daya manusia, dll.

### g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 15. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Volume produksi perikanan tangkap	133,81%	2.404.342.000	2.378.475.662	3.217.152.712	838.677.050
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				34,88%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{34,88\%}{20} \times 50 \right)$				137,20%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp2.378.475.662,00 atau 98,92% dari total anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 34,88% dan nilai efisiensi sebesar 137,20%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Kejawanen, didukung oleh 12 (dua belas) orang petugas pendataan produksi ikan dan 2 (dua) orang enumerator. Kegiatan pendaratan ikan di PPN Kejawanen relatif cepat dan kondusif sehingga tidak ada kegiatan pendaratan ikan yang menghabiskan waktu sampai 24 jam/sampai diberlakukan sistem shift pegawai.

#### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pelabuhan perikanan yang meliputi kegiatan:

- Pelabuhan Perikanan UPT pusat yang dikelola sesuai standar perasional dan prosedur dalam rangka pelaksanaan PNBP pasca produksi
- Layanan data dan informasi – Penyelenggaraan, pengolahan, dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu koordinasi dengan instansi terkait perihal validasi data statistik perikanan tangkap.

#### 3. 1. 3. Sasaran Kegiatan 3 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang berdaya saing

**IKU 3 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Persen)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 jenis PNBK yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang dalam prosesnya diperlukan analisa atau evaluasi permohonan perusahaan.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Tahun 2023

<b>SK 3</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang berdaya saing</b>								
<b>IK 3</b>	<b>Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen</b>								
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawanen</b>	
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa permohonan perusahaan yang masuk di PPN Kejawanan seluruhnya dianalisa dan/atau dievaluasi yang kemudian hasil evaluasinya dikirimkan ke Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk mendapatkan izin prinsip yang akan menjadi dasar dilaksanakannya perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan di PPN Kejawanan.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2018 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan sama-sama mencapai target yaitu sebesar 100 %.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Keberhasilan realisasi indeks kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi yang mencapai target tahun 2023, tidak lepas dari komitmen dan kerja keras PPN Kejawanan, khususnya Petugas Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan dalam memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan. Peran serta dari pengguna jasa yang kooperatif dalam

menyampaikan kelengkapan berkas permohonan juga menjadi faktor penunjang keberhasilan sehingga proses analisis menjadi lebih cepat.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 18. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengelolaan Perusahaan dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	100%	14.816.000	14.478.781	14.816.000	337.219
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				2,28%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{2,28\%}{20} \times 50 \right)$				55,69%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp14.478.781,00 atau 97,72% dari total anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 2,28% dan nilai efisiensi sebesar 55,69%.

**2. Sumber Daya Manusia**

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, didukung oleh 1 (satu) orang petugas Petugas Pelayanan Penggunaan

Tanah dan/atau Bangunan yang merangkap jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien.

**h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Mengacu pada analisis keberhasilan atau kegagalan, beberapa program / kegiatan dapat menjadi solusi yang dapat berdampak peningkatan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Permohonan yang dianalisis dan atau evaluasi adalah dengan adanya surat dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor : B.732/DJPT.4/PL.710/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Kewajiban Telaahan, Evaluasi dan Analisis Permohonan Pelaku Usaha dalam Penggunaan BMN di Pelabuhan Perikanan.

**IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)**

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai dengan keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan melalui aplikasi PIPP. Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data Operasional Pelabuhan dengan indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis data yang harus diinput melalui aplikasi PIPP.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Tahun 2023

<b>SK 3</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan yang berdaya saing</b>								
<b>IK 4</b>	<b>Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan</b>								
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawan</b>	
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
100	76,75	87,41	88	87,47	83	90,12	108,58	84	107,28

**a. Target dan Realisasi**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat kinerja pelabuhan Tahun 2023 yaitu 90,12 atau 108,58% dari target Tahun 2023.

Tabel 20. Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan (EVKIN)</b>
1.	Januari	89,25
2.	Februari	88,00
3.	Maret	91,50
4.	April	91,50
5.	Mei	88,75
6.	Juni	89,25
7.	Juli	92,50
8.	Agustus	92,50
9.	September	88,25
10.	Oktober	90,50
11.	November	87,25
12.	Desember	92,25
Tahun 2023		90,12

Tabel 21. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Oktober Tahun 2023

**INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN**  
PPN. Kejawanan

Oct-23

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	October		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	25,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	103,28	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	233,00	0,00	
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	60,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	7,83	3,75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	22,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	131,82	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	17,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	15,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	99,19	3,00	Antara 75 - 99% dari kebutuhan
22	Penyaluran Es (kapal)	%	97,75	3,00	Antara 75 - 99% dari kebutuhan
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	96,40	3,75	Antara 75 - 99% dari kebutuhan
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	16,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.961,61	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.930,11	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (63)	1,00	---
Jumlah				90,5	
Kesimpulan dan Rekomendasi				<b>SANGAT BAIK</b>	

Tabel 22. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan November Tahun 2023

**INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN**  
PPN. Kejawanan

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	November		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	27,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	105,88	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	656,00	0,00	
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	120,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	29,75	3,75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	70,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	137,14	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	12,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan,	Jumlah Kegiatan	22,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	55,79	2,00	Antara 50 - 74% dari kebutuhan
22	Penyaluran Es (kapal)	%	73,11	2,00	Antara 50 - 74% dari kebutuhan
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	69,36	2,50	Antara 50 - 74% dari kebutuhan
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	16,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.961,61	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	3.015,37	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (63)	1,00	---
Jumlah				87,25	
Kesimpulan dan Rekomendasi				<b>SANGAT BAIK</b>	

Tabel 23. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Desember Tahun 2023

**INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN**  
PPN. Kejawanan

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Desember		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	27,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	99,28	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	4.671,00	4,00	Diatas 2250 GT
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	150,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	42,18	5,00	Lebih dari 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	92,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	132,61	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	10,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pelaksanaan K5	Jumlah Kegiatan	24,00	4,00	Diatas 4 kali
20		Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	34,56	1,00	Kurang dari 50% dari kebutuhan
22	Penyaluran Es (kapal)	%	26,45	1,00	Kurang dari 50% dari kebutuhan
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	30,88	1,25	Kurang dari 50% dari kebutuhan
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	16,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.961,61	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.973,82	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	4 (67)	4,00	---
Jumlah				92,25	
Kesimpulan dan Rekomendasi				<b>SANGAT BAIK</b>	

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami periode yang fluktuatif. sempat mengalami tren positif di tahun 2021, namun kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya pada periode yang sama meskipun penurunan yang terjadi tidak signifikan. Realisasi terhadap capaian indikator kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2023. Kondisi demikian dapat diakibatkan oleh banyak

faktor mengingat evaluasi kinerja dipengaruhi oleh 27 kriteria penilaian, seperti aktivitas kedatangan dan keberangkatan kapal yang setiap tahun mengalami pasang surut, volume produksi harian, dll.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Perbandingan dengan tahun menengah dalam Renstra (2023) adalah 108,58%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
83	90,12	108,58	83	89,85	108,25

Capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan” di PPN Kejawanan tercatat sebesar 90,12 dari target sebesar 83%. Capaian tersebut lebih baik dari PPN Pekalongan yakni sebesar 89,85 dari besaran target yang pada periode yang sama.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pada Tahun 2023, indikator kinerja tingkat operasional pelabuhan telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Penilaian evaluasi kinerja sangat tergantung dari kegiatan operasional yang telah dilaksanakan serta keaktifan operator PIPP dalam memasukkan data operasional, baik secara harian maupun bulanan melalui aplikasi PIPP. Keberhasilan atau kegagalan penilaian evaluasi kinerja terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kriteria yang merupakan kegiatan operasional Pelabuhan di PPN Kejawanan, yaitu :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-Logbook
3. Aplikasi SPB Online
4. SHTI
5. Realisasi Penyerapan Anggaran
6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan

8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (Docking, Bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan
16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLKK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (Kapal dan Industri Pengolahan)
22. Penyaluran Es (kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan Tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Tercapainya target juga didukung oleh adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok yang melakukan tugasnya, terpeliharanya manfaat fasilitas fungsional dan pokok Pelabuhan perikanan, tersedianya kualifikasi SDM pegawai yang sesuai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan pada Pelabuhan perikanan, dan semakin tumbuh dan berkembangnya stakeholder dalam tata niaga perikanan, serta keaktifan operator PIPP.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain beberapa kriteria bergantung pada aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan, seperti volume produksi, STBLKK, frekuensi kunjungan kapal, dan tambat labuh dimana kriteria kriteria tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti faktor cuaca/alam serta trend dan musim penangkapan ikan.

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen dan kesadaran masing-masing petugas dalam hal pemenuhan kriteria evaluasi kinerja.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu melakukan penambahan sumber daya manusia agar proses pemenuhan kriteria tidak hanya bergantung pada satu/dua individu, sehingga proses pemenuhan kriteria pada evaluasi kinerja bisa efektif dan efisien.

## g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 25. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Operasional Pelabuhan	108,58%	653.095.000	646.511.246	709.119.535	62.608.289
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				9,59%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{9,59\%}{20} \times 50 \right)$				73,97%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sebesar Rp646.511.246,- atau 98,99% dari total anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 9,59% dan nilai efisiensi sebesar 73,97%.

### 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Operasional PPN Kejawanan adalah petugas/penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing kelompok serta operator PIPP yang merangkap sebagai pengelola data dan jabatan fungsional AP3T dan P3T.

## h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Operasional Pelabuhan yaitu :

- Program prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan, berupa penambahan peralatan/perlengkapan operator;

- Program dukungan manajemen, yang terdiri atas : Penambahan dan peningkatan kualitas operator.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Tingkat Operasional Pelabuhan” yaitu sosialisasi serta pembinaan ke UPT binaan meliputi pembinaan kesyahbandaran, pembinaan serta koordinasi terkait pengelolaan dan operasional PIPP, dan supervisi serta pemantauan CPIB; pertemuan kesyahbandaran; pertemuan SHTI; pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu dan uji kimia dan mikrobiologi.

#### **IKU 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Pelabuhan Perikanan merupakan sarana yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang operasional kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Salah satu fungsi pemerintahannya yaitu menyelenggarakan pelayanan bidang Kesyahbandaran, yang spesifik melayani kapal - kapal perikanan yang beroperasi di pelabuhan perikanan.

PPN Kejawanan, sebagai salah satu pelabuhan perikanan kelas Nusantara, turut melaksanakan tugas dan fungsi Kesyahbandaran sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Pada peraturan tersebut disebutkan setidaknya terdapat 18 tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Namun, pada perhitungan indikator kinerja ini, hanya 3 pelayanan Kesyahbandaran yang dijadikan indikator, yang dianggap sebagai pelayanan yang utama dan paling sering dilaksanakan, antara lain Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar, Pelayanan Penerbitan STBLKK, dan Pelayanan Penerbitan SHTI (Lembar Awal).

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

<b>SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing</b>									
<b>IK 5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>									
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawanan</b>	
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
100	n/a	n/a	n/a	n/a	85	98,40	115,76	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Realisasi pencapaian Indikator kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan bersifat tahunan yaitu sebesar 98,40% dari target sebesar 85%.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Dibandingkan dengan tahun 2022, indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan karena baru muncul pada tahun 2023.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
85	98,40	115,76	50	69	138

Dibandingkan dengan UPT Pelabuhan Perikanan Pusat terdekat, yaitu PPN Pekalongan, persentase realisasi PPN Kejawanan berada dibawah PPN Pekalongan yang sebesar 138%. Namun demikian, PPN Kejawanan menetapkan target yang jauh lebih besar dibandingkan PPN Pekalongan, yaitu sebesar 85% dibandingkan PPN Pekalongan yang sebesar 50%, dengan realisasi yang hampir sempurna yaitu sebesar 98,40% dibandingkan PPN Pekalongan yang sebesar 69%. Ini menunjukkan optimisme dan komitmen kuat PPN Kejawanan dalam melaksanakan pelayanan bidang Kesyahbandaran secara optimal dengan dukungan sumber daya yang tersedia.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

**Analisa Kualitatif :**

Berdasarkan data kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan serta rekapitulasi penerbitan Lembar Awal di PPN Kejawanan dibandingkan dengan data kapal yang beraktivitas di PPN Kejawanan (kapal

domisili), PPN Kejawanan telah melaksanakan pelayanan Kesyahbandaran dengan sangat baik. Syahbandar di PPN Kejawanan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Syahbandar dibantu oleh Petugas Kesyahbandaran yang bertugas membantu Syahbandar terutama dalam pemeriksaan awal dokumen permohonan penerbitan dokumen - dokumen Kesyahbandaran. Pembagian tugas yang jelas serta kerjasama yang baik antar petugas menjadikan persentase capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Kejawanan melampaui target yang telah ditetapkan.

#### **Analisa Kuantitatif :**

Persentase capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat pelayanan penerbitan Persetujuan Berlayar (x1) :

**PBT/KPD x 100**

**PBT** = Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (satuan kapal)

**KPD** = Kapal Domisili (kapal yang beraktivitas di PPN Kejawanan)

sehingga didapatkan perhitungan :

$$= 236/241 \times 100$$

$$= 98$$

Bobot penerbitan Persetujuan Berlayar = 40%, sehingga;

$$= 98 \times 40\%$$

$$= \underline{39,2\%}$$

Tingkat pelayanan penerbitan STBLKK (x2):

**STBLKKT/KPD x 100**

**STBLKKT** = STBLKK yang diterbitkan (satuan kapal)

**KPD** = Kapal Domisili (Kapal yang beraktivitas di PPN Kejawanan)

sehingga didapatkan perhitungan :

$$= 236/241 \times 100$$

$$= 98$$

Bobot penerbitan STBLKK = 40%, sehingga;

$$= 98 \times 40\%$$

$$= \underline{39,2\%}$$

Tingkat pelayanan penerbitan SHTI (Lembar Awal) (x3):

**100 - [(VSHTI/SHTIT) x 100]**

**VSHTI** = Jumlah permintaan verifikasi SHTI (lembar awal)

**SHTIT** = SHTI (lembar awal) yang diterbitkan

sehingga didapatkan perhitungan :

$$= 100 - [(0/470) \times 100]$$

$$= 100 - 0$$

$$= 100$$

Bobot penerbitan STI (lembar awal) = 20%, sehingga

$$= 100 \times 20\%$$

$$= \underline{20\%}$$

Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$x_1 + x_2 + x_3, \text{ sehingga} \\ = 39,2\% + 39,2\% + 20\% \\ = \underline{\underline{98,4\%}}$$

#### g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 28. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelayanan Kesyahbandaran	115,76%	43.370.000	43.027.522	50.207.153	7.179.631
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				16,55%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{16,55\%}{20} \times 50 \right)$				91,39%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sebesar Rp43.027.522,- atau 99,21% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 16,55% dan nilai efisiensi sebesar 91,39%.

##### 2. Sumber Daya Manusia

Realisasi capaian indikator ini ditunjang oleh sumber daya manusia Kesyahbandaran yang kompeten dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima. Sumber daya manusia yang tersedia di PPN Kejawanan guna menunjang capaian indikator kinerja ini antara lain; 2 (dua) orang Syahbandar

Pelabuhan Perikanan, dan 3 (tiga) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Desimilasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB Di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi
2. Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran
3. Operasional Kesyahbandaran di wilayah Binaan
4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi
5. Kesyahbandaran dalam penerapan PNBP Pasca Produksi melalui Migrasi Perizinan di Pelabuhan Perikanan
6. Desiminasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan

#### **3. 1. 4. Sasaran Kegiatan 4 - Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan yang optimal**

##### **IKU 6 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

<b>SK 4</b>	<b>Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal</b>								
<b>IK 6</b>	<b>Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	32,05	128,20	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Pengukuran capaian kinerja Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 32,05% dari target realisasi Tahun 2023 sebesar 25% atau sebesar 128,20% dari target realisasi.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan karena baru muncul pada tahun 2023.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
25	32,05	128,20	75	80	106,67

Capaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan bila dibandingkan dengan PPN Pekalongan tidak sama target Indikator kerjanya, dikarenakan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan

Perikanan didapatkan dari persentase perbandingan masterplan atau draft masterplan dimana PPN Kejawanan telah memiliki masterplan sedangkan PPN Pekalongan belum, namun bila dibandingkan persentase realisasinya maka realisasi PPN Kejawanan lebih besar dengan persentase sebesar 128,20 dibandingkan PPN Pekalongan yang mencapai persentase target realisasi 106,67 %.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan”. Peningkatan fasilitas untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur dilakukan melalui kegiatan pembangunan prasarana Pelabuhan perikanan.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2023 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Langkah yang akan dilakukan antara lain koordinasi terkait perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 31. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional	128,20%	200.000.000	198.009.755	256.400.000	58.390.245
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				29,20%	

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{29,20\%}{20} \times 50 \right)$	122,99%
---	---------

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yaitu Rp198.009.755,00 atau 99% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 29,20% dan nilai efisiensi sebesar 122,99%.

## 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan adalah KPA, PPK, Pokja ULP dan Tim Teknis PTP yang semuanya dengan jabatan fungsional, sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah sangat efisien.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja tersebut adalah program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pelabuhan perikanan dengan kegiatan pembangunan prasarana pelabuhan perikanan berupa Pembuatan Pos Informasi, perkerasan parkir wisata, pembangunan center point wisata bahari, jaringan air bersih, leveling area pantai, leveling pantai timur, pemasangan jaringan listrik WBK, renovasi TPS, dan Pembuatan selasar kuliner.

#### IKU 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang dioperasikan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan diukur berdasarkan skor pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di *update* berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

<b>SK 4</b>	<b>Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal</b>								
<b>IK 1</b>	<b>Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawanan</b>	
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30,01	87,87	292,80	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Pengukuran capaian kinerja Indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Tahun 2023 adalah sebesar 87,87 atau 292,80% dari target Tahun 2023.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan karena baru muncul pada tahun 2023.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

<b>PPN Kejawanan</b>			<b>PPN Pekalongan</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
30,01	87,87	292,80	30,01	41,39	137,92

Capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” dibandingkan dengan UPT Pelabuhan Perikanan Pusat terdekat, yaitu PPN Pekalongan, nilai PPN Kejawanan berada diatas PPN Pekalongan yaitu sebesar 87,87 sedangkan PPN Pekalongan memperoleh nilai sebesar 41,39.

#### f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian iku ini dilaksanakan melalui mekanisme penginputan pelaksanaan program dan kegiatan tata kelola lingkungan ke dalam aplikasi SELARASKAN yang merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan di cantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

nilai pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan didukung dengan telah terlaksananya program pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan sehingga memudahkan dalam penginputan dikarenakan sebagian besar program pada aplikasi telah dilaksanakan di PPN Kejawanan

#### g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	292,80%	1.565.142.000	1.554.079.358	4.582.773.327	3.028.693.969
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				193,51%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{193,51\%}{20} \times 50 \right)$				533,77%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sebesar

Rp1.554.079.358,- atau 99,29% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 193,51% dan nilai efisiensi sebesar 533,77%.

## **2. Sumber Daya Manusia**

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah tim yang terdiri dari Kepala Pelabuhan sebagai penanggung jawab, Ketua sekretaris dan 5 (lima) orang anggota sesuai dengan surat penugasan dari Kepala PPN Kejawanan.

### **h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Operasional Kegiatan Selaraskan
2. Pengendalian dan Pemantauan Lingkungan RKL/RPL
3. Sosialisasi Penataan Lingkungan Bagi Stakeholder di Pelabuhan
4. Gerakan Penghijauan Lingkungan Kawasan Pelabuhan

### **3. 1. 5. Sasaran Kegiatan 5 - Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan**

#### **IKU 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)**

Salah satu tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan, utamanya terkait tupoksi kesyahbandaran, PPN Kejawanan bertanggung jawab untuk memastikan setiap kapal perikanan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, terutama pada aspek kelaikan kapal perikanan. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama, penerbitan dokumen kapal perikanan, dalam hal ini Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dilaksanakan oleh 6 (enam) orang pegawai yang telah dikukuhkan menjadi Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri KP No.33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Tahun 2023

<b>SK 5</b>	<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>									
<b>IK 8</b>	<b>Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan</b>									
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawanan</b>		
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>	
339	n/a	n/a	n/a	701	50	188	376	n/a	-	

#### a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa produktivitas penerbitan dokumen kapal, khususnya SKKP di PPN Kejawanan, sangat tinggi. Hal ini, tak lepas dari komitmen PPN Kejawanan dalam mengakomodasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku usaha perikanan tangkap. Selain itu, cakupan wilayah kerja yang luas, yakni kapal - kapal perikanan yang berdomisili di wilayah Karawang, Jawa Barat sampai wilayah Tegal, Jawa Tengah, menjadikan PPN Kejawanan sebagai sentra pelayanan penerbitan SKKP. Apabila dilakukan *breakdown* terhadap data akumulatif pada tabel di atas, maka penerbitan SKKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)</b>
1.	Januari	27
2.	Februari	6
3.	Maret	21
4.	April	6
5.	Mei	20
6.	Juni	18
7.	Juli	16
8.	Agustus	26
9.	September	19
10.	Oktober	11
11.	November	10
12.	Desember	8
Total Tahun 2023		188

#### b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2019 hingga 2021 masih belum terdapat indikator kinerja Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan. Pada tahun 2022, pelayanan penerbitan SKKP baru dimulai sejak periode 30 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (6 bulan).

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Perbandingan dengan tahun menengah dalam Renstra (2023) adalah 109,73%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
50	188	376	50	198	396

Jika dibandingkan dengan capaian nilai tingkat operasional PPN Pekalongan, capaian nilai operasional PPN Kejawanan lebih rendah 20% atau selisih 10 dokumen. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya kapal perikanan izin daerah yang berada di pelabuhan perikanan binaan PPN Kejawanan telah melakukan migrasi sehingga telah beralih ke izin pusat.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Capaian IKU ini dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kelaikan kapal perikanan secara reguler. Pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sepenuhnya dilaksanakan di aplikasi SICEFI melalui tautan kapal.kkp.go.id. Khusus untuk kapal izin daerah, disposisi penugasan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dilakukan oleh Koordinator, yang dalam hal ini adalah Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, dan proses verifikasi hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta penandatanganan SKKP dilakukan di PPN Kejawanan oleh PPKKP dan Kepala PPN Kejawanan. Sebanyak 188 SKKP untuk kapal perikanan izin daerah telah diterbitkan.

**Analisa Kuantitatif :**

Capaian IKU ini dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini :

Target (T) = 50 (dokumen)

Capaian (C) = 188 (dokumen)

persentase =  $C/T \times 100\%$

$$= 188/50 \times 100\%$$

$$= 376\%$$

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, persentase capaian IKU ini menurun cukup tajam. Pada 2022, SKKP yang diterbitkan untuk kapal izin daerah (capaian) adalah sebanyak 446 produk. Apabila dengan nominal target yang sama, maka persentasenya adalah :

$$446/50 \times 100\% = 892\%$$

terdapat deviasi sebanyak 516% antara capaian 2022 dengan 2023. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan di bawah ini.

### g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan	376%	227.000.000	226.429.537	853.520.000	627.090.463
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				276,25%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{276,25\%}{20} \times 50 \right)$				740,63%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp226.429.537,00 atau 99,75% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 276,25% dan nilai efisiensi sebesar 740,63%.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, didukung oleh 6 (enam) orang petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal yang merangkap jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien. Namun, di sisi lain, pemanfaatan SDM ini juga menjadi bahan evaluasi tersendiri karena berpotensi pelaksanaan tugas menjadi tidak fokus yang mungkin dapat menghambat proses pelayanan penerbitan SKKP.

### **h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

#### **Faktor Penghambat :**

Meskipun capaian telah melampaui target IKU, namun demikian terdapat penurunan dari periode tahun sebelumnya. hal - hal yang mempengaruhi antara lain :

1. Pada 2023, banyak kapal izin daerah yang melakukan migrasi perizinan ke izin pusat, sehingga terhitung sebagai penerbitan SKKP untuk kapal izin pusat.
2. Aplikasi SICEFI sepenuhnya mulai diterapkan pada 2023 yang membutuhkan penyesuaian baik dari pihak pelaku usaha maupun dari sisi petugas.

#### **Faktor Pendukung :**

Terpenuhinya target IKU didukung oleh beberapa hal di bawah ini :

1. Jumlah SDM Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan mengalami penambahan pasca dikukuhkannya 2 (dua) orang PPKKP pada Oktober 2023
2. Dukungan anggaran dalam melaksanakan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan meningkatkan produktivitas PPKKP dalam menerbitkan SKKP pada 2023.

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Sosialisasi pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang diadakan pada September 2023 dan melibatkan stakeholder terkait.
2. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan segera setelah permohonan masuk, meningkatkan kredibilitas petugas dan produktivitas kinerja.

### 3. 1. 6. Sasaran Kegiatan 6 - Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

#### IKU 9 - Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha sub sektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan.

Khusus untuk elemen personel, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayaran, perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan merupakan hal penting dan krusial dalam operasional kapal perikanan. Komitmen terhadap penegakan HAM Perikanan menjadi *concern* tersendiri bagi PPN Kejawanan. Melalui penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan aspek perlindungan awak kapal perikanan dapat lebih terjamin. Adapun kompetensi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan, keamanan dan keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, serta keamanan pangan dan jaminan mutu ikan hasil tangkapan.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan” Tahun 2023

SK 6 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan									
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	14,36	143,60	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Pada 2023, PPN Kejawanan menargetkan 10% dari total awak kapal perikanan yang memiliki perjanjian kerja laut telah bersertifikat kompetensi. Adapun realisasi capaian adalah sebesar 14,36%.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan bahwa IKU Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya merupakan IKU baru dan akan dicapai pada 2023.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak terdapat target menengah dalam Rencana Strategis Tahun 2023.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
10	14,36	143,60	5	7	140

Pada tabel di atas, dapat dilihat baik target maupun realisasi indikator kinerja PPN Kejawanan lebih besar dibandingkan PPN Pekalongan. Dapat dipahami, bahwa keragaan pelaku usaha di PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan terdapat perbedaan, terutama pada bentuk usahanya. Di lingkungan PPN Kejawanan sendiri, mayoritas pelaku usaha sudah berbentuk badan usaha, sehingga lebih mudah diedukasi dan cenderung lebih patuh dan adaptif terhadap dinamika regulasi.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

**Analisa Kualitatif :**

Peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan membutuhkan kolaborasi dan keinginan yang kuat antar pemangku kepentingan. Secara regulasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 telah menetapkan syarat bekerja bagi awak kapal perikanan. PPN Kejawanan telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi unsur - unsur regulasi tersebut dengan pula memperhatikan aspek - aspek

sosial kultural masyarakat nelayan. Selain itu, PPN Kejawanan juga melakukan studi banding dengan pelabuhan perikanan di sekitar wilayah PPN Kejawanan serta UPT Pelabuhan Perikanan yang setingkat, untuk melihat persentase peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan.

**Analisa Kuantitatif :**

Guna mengetahui nilai persentase perlindungan awak kapal perikanan digunakan rumusan sebagai berikut :

(Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi di PPN Kejawanan)

---

(Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL di PPN Kejawanan)  
x100%

Pada 2023, sebanyak 926 orang awak kapal telah tersertifikasi dan memiliki dokumen PKL. Sementara awak kapal yang telah memiliki PKL adalah sebanyak 6.448 orang. Adapun persentasenya adalah sebagai berikut :

$$926/6448 \times 100\% = \mathbf{14,36\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PPN Kejawanan telah melampaui target IKU ini, namun demikian terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perolehan angka tersebut yang terbilang masih sangat kecil.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 41. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan	143,60%	23.620.000	23.215.000	33.918.320	10.703.320

Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				45,31%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{45,31\%}{20} \times 50 \right)$				163,29%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp23.215.000,00 atau 98,29% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 45,31% dan nilai efisiensi sebesar 163,29%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menunjang terlaksananya indikator Peningkatan Pengetahuan, Kompetensi, dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan di PPN Kejawanan antara lain; 2 (dua) orang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan 3 (tiga) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Meskipun telah melampaui target, persentase jumlah awak kapal yang bersertifikat dan terlindungi melalui PKL dibanding keseluruhan awak kapal yang terlindungi melalui PKL masih sangat kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

#### Faktor penghambat :

1. Lemahnya penegakan peraturan di pelabuhan perikanan, tidak hanya di PPN Kejawanan, namun juga di seluruh pelabuhan perikanan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial kultural ekonomi awak kapal perikanan yang menyebabkan keengganan untuk memiliki sertifikat.
2. Kebutuhan SDM awak kapal yang tinggi menyebabkan traffic permintaan awak kapal yang tidak sebanding dengan SDM awak kapal yang telah tersertifikasi. Sementara itu, kapal perikanan tidak

bisa menunggu untuk terpenuhinya SDM awak kapal yang tersertifikasi untuk dapat berangkat melaut sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menentukan kebijakan yang bersifat *win win solution*.

3. Pemilik kapal perikanan yang tidak terlalu mementingkan sertifikasi, namun kemampuan bekerja awak kapal yang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, menyebabkan awak kapal enggan untuk memiliki sertifikat kompetensi.
4. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 578/DJPT.1/PI.240/X/2022 tentang Pemenuhan Persyaratan Bekerja Bagi Awak Kapal Perikanan Pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia, yang masih memberikan waktu kepada awak kapal perikanan untuk memiliki sertifikat kompetensi maupun profisiensi sampai dengan 31 Desember 2023.

### **Faktor Pendukung :**

Meskipun banyak dari awak kapal perikanan yang belum memiliki sertifikat kompetensi maupun profisiensi, namun PPN Kejawanan tetap berusaha menegakkan aspek perlindungan awak kapal perikanan melalui pengesahan Perjanjian Kerja Laut yang berdasarkan salah satunya dari kepesertaan awak kapal perikanan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Terbukti dari seluruh awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan di PPN Kejawanan, seluruhnya telah memiliki dokumen PKL. Hal ini dapat terlaksana antara lain dikarenakan faktor - faktor sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan di PPN Kejawanan, khususnya Syahbandar di PPN Kejawanan yang berwenang dalam hal keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dalam mendukung perlindungan HAM perikanan, salah satunya melalui pemeriksaan dan pengesahan PKL.
2. Kesadaran yang mulai tumbuh dari sisi pelaku usaha dan awak kapal perikanan akan pentingnya perlindungan bagi awak kapal selama bekerja di atas kapal. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang intensif dari PPN Kejawanan kepada masyarakat pemangku kepentingan.

Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa program/ kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi terkait penerbitan dokumen awak kapal perikanan dan perjanjian kerja laut yang dilaksanakan pada Triwulan III 2023
2. Pemeriksaan dokumen yang intensif dan pengesahan terhadap Perjanjian Kerja Laut (PKL) pada saat kapal akan berangkat dan bermohon penerbitan Persetujuan Berlayar oleh Petugas Kesyahbandaran dan Syahbandar di PPN Kejawanan
3. Kerjasama dengan BPJAMSOSTEK Kota Cirebon dalam hal pengadaan dan penempatan petugas PERISAI BPJAMSOSTEK di lingkungan PPN Kejawanan untuk mempermudah dan mempercepat proses kepesertaan awak kapal dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

### 3. 1. 7. Sasaran Kegiatan 7 - Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

#### IKU 10 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kejawanan” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Internal PPN Kejawanan yang ditunjuk oleh Kepala PPN Kejawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

SK 7 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	81,34	85,49	85,49	75,07	80,94	107,82	75,07	107,82

**a. Target dan Realisasi**

Capaian IKM Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 adalah 80,94 atau 107,82% dari target Tahun 2023.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

IKM tersebut baru muncul pada Tahun 2020 dan memiliki *trend* kenaikan positif hingga Tahun 2022, namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan atau selisih nilai sebesar 4,55.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka IKM tersebut memiliki realisasi dengan persentase sebesar 107,82%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
75,07	80,94	107,82	75,07	77,75	103,57

Dengan target yang sama, realisasi Nilai PM ZI PPN Kejawanan lebih tinggi dengan selisih nilai 3,19 dari PPN Pekalongan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Keberhasilan dan kegagalan dokumen WBK ditentukan oleh pemenuhan dokumen pendukung WBK yang dihitung dari perbandingan jumlah dokumen WBK yang dipenuhi terhadap dokumen pendukung WBK yang dipersyaratkan.

Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat format LKE yang baru, sehingga perlu ada penyesuaian dan penambahan data dukung lebih lanjut, untuk tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu melengkapi kekurangan data dukung pada masing-masing sub area dan melaksanakan kegiatan monev bulanan.

## g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	107,82%	50.000.000	49.141.514	53.909.684	4.768.170
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				9,54%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{9,54\%}{20} \times 50 \right)$				73,84%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp49.141.514,00 atau 98,28% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 9,54% dan nilai efisiensi sebesar 73,84%.

### 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang melaksanakan tugas terlaksana capaian indikator kinerja ini masuk dalam Tim WBK berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala Pelabuhan. Jumlah SDM sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari Kepala Pelabuhan (Penanggungjawab), Ketua, Sekretaris, serta Koordinator dan Anggota Pokja per masing-masing area. Penggunaan SDM sudah efisien karena semua pegawai yang melaksanakan tugas pemenuhan dokumen WBK melakukan rangkap pekerjaan diluar tupoksi. Selain itu,

pengumpulan dokumen ZI WBK dilakukan melalui link *google drive* sehingga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dokumen yang harus dipenuhi.

**h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Komponen Pelaksanaan rencana aksi melalui Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

**IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

<b>SK 7</b>	<b>Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>IK 11</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawanan</b>	
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
100	n/a	n/a	n/a	100	75	100	133,33	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2023 adalah 100% atau 133% dari target triwulan IV Tahun 2023 yang berarti temuan/ rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja telah ditindaklanjuti secara menyeluruh.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:  
 Pada tahun 2019-2022, tidak terdapat IKM terkait Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak dapat membandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
75	100	133,33	75	100	133,33

Jika dibandingkan dengan capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di PPN Pekalongan, persentase capaiannya sama dengan PPN Kejawanan sebesar 100%.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Berdasarkan rekomendasi pengawasan Itjen (rekapitulasi triwulan III Tahun 2023), PPN Kejawanan terdapat temuan, namun dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai saran yang diberikan Itjen. Hal tersebut didukung oleh peran petugas pelayanan dan Ketua Tim Kerja TKPU yang mampu menyelesaikan temuan tersebut.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 47. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kegiatan perjalanan dalam rangka	133,33%	69.700.000	65.519.438	92.933.333	27.413.895

pelaporan					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROI) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				39,33%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{39,33\%}{20} \times 50 \right)$				148,33%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp 65.519.438,00 atau 94% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 39,33% dan nilai efisiensi sebesar 148,33%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” pada triwulan IV Tahun 2023, didukung oleh tim pengelolaan keuangan.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan untuk tercapainya IKM tersebut yang merupakan mandatory dari IKU Inspektorat Jenderal adalah kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan.

#### IKU 12 - Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator Nilai Rekonsiliasi kinerja merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja DJPT, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Satker Lingkup DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%).

Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

<b>SK 7</b>	<b>Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>IK 12</b>	<b>Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	93	98,69	106,12	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 adalah 98,69 atau 106,12% dari target Tahun 2023.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:  
 Pada tahun 2019-2022, tidak terdapat IKM terkait Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak dapat membandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
93	98,69	106,12	93	98,99	106,44

Capaian Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Pekalongan lebih tinggi 0,32% dari PPN Kejawanan. Hal tersebut dipengaruhi oleh nilai NPSS PPN Pekalongan yang lebih tinggi.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Hambatan yang dihadapi adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk periode selanjutnya.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 50. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	106,12%	34.000.000	33.853.194	36.080.215	2.227.021,05
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				6,55%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{6,55\%}{20} \times 50 \right)$				66,38%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp33.853.194,00 atau 99,57% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 6,55% dan nilai efisiensi sebesar 66,38%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2023, SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota dengan rincian Kepala Subbagian Umum dan perwakilan dari masing-masing tim kerja.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator kinerja “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” yaitu Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

#### IKU 13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

SK 7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
n/a	60,47	67,58	80,47	84,86	85	90,94	106,99	81	112,27	

#### a. Target dan Realisasi

Capaian indikator kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun 2023 sebesar 90,94 atau 106,99% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

IKM IP ASN muncul pada Tahun 2019 dan memiliki kenaikan setiap tahunnya hingga Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan munculnya kesadaran pegawai ASN untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian Tahun 2023 memiliki persentase sebesar 112,27% dari target.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
85	90,94	106,99	80	89,92	112,40

Jika dibandingkan dengan persentase, capaian IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan lebih rendah dari PPN Pekalongan dengan selisih 5,41%. Namun jika dilihat dari target dan realisasi, PPN Kejawanan memiliki capaian yang lebih tinggi.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, hambatan yang dihadapi yaitu pegawai yang mengikuti bimtek dan sosialisasi belum aktif melaporkan hasil kegiatan bimtek/diklat/sosialisasi yang diikuti ke bagian kepegawaian. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah reminder kepada seluruh pegawai terkait info pendaftaran bimtek/diklat/sosialisasi serta pengumpulan sertifikat bimtek/diklat/sosialisasi dan mengunggah data dukung pada aplikasi SIMPEG.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Manajemen SDM	106,99%	20.500.000	20.424.533	21.932.588	1.508.055
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				7,36%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{14,18\%}{20} \times 50 \right)$				9,20%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp20.424.533,00 atau 99,63% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 7,36% dan nilai efisiensi sebesar 9,20%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 63 (enam puluh tiga) orang ASN. Agar capaian IP ASN maksimal, masing – masing pegawai telah diarahkan mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan jenis jabatan memenuhi kriteria penilaian dimensi kompetensi selain itu diadakan beberapa kali kegiatan pembinaan pegawai dan monitoring bulanan SKP pegawai untuk menjaga nilai kinerja serta tingkat kedisiplinan pegawai.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Tahun 2023 yaitu monitoring dan evaluasi kinerja serta penerapan disiplin pegawai. Selain itu, pegawai telah mengikuti kegiatan Bimtek/Seminar/Workshop secara luring maupun daring.

#### IKU 14 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Tahun 2023

SK 7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan								
IK 14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan								
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	87,10	87,10	77,50	89,69	115,73	75	119,59

##### a. Target dan Realisasi

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan adalah 89,69 atau 115,73% dari target Tahun 2023.

##### b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2023 dengan selisih nilai sebesar 2,59.

##### c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2023 memiliki persentase sebesar 119,59%.

##### d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

##### e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
77,5	89,69	115,73	77,5	88,75	114,52

PPN Kejawanan mempunyai realisasi dan capaian lebih tinggi dari PPN Pekalongan. Hal tersebut dapat dikarenakan di PPN Kejawanan terdapat jabatan fungsional tertentu - Pengelola PBJ, sementara di PPN Pekalongan belum memiliki JFT tersebut.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tidak terdapat kendala yang berarti, namun tetap dilakukan upaya untuk memantau dan jika dimungkinkan percepatan pengadaan jasa melalui penyedia serta dilakukan pemantauan dan percepatan PBJ.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 56. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	115,73%	5.851.751.000	5.825.608.633	6.772.174.802,45	946.566.169
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				16,18%	

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{16,18\%}{20} \times 50 \right)$	90,44%
---	--------

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp5.825.608.633,00 atau 99,55% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 16,18% dan nilai efisiensi sebesar 90,44%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola PBJ.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan dalam RKAKL yang menunjang kegiatan ini diantaranya pekerjaan fisik maupun belanja barang/jasa.

Upaya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara e-purchasing.

### IKU 15 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPN Kejawanan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN Satker diukur berdasarkan jumlah nilai dari berbagai unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (10%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%);
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi asset) yang diselesaikan (25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (25%);
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%).

Tabel 57. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

SK 7 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	85	85	77,50	87,50	112,90	75	116,67

**a. Target dan Realisasi**

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 sebesar 87,50 atau 112,90% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2023 dengan selisih nilai sebesar 2,50.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2023 memiliki persentase sebesar 116,67%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
77,5	87,50	112,90	77,5	100	129,03

Perbandingan dengan satker lain belum dapat dilakukan karena pengukuran bersifat tahunan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja yaitu sinkronisasi data pada SIMAN BMN dan SAKTI pada akhir tahun membutuhkan waktu yang lebih lama sekitar satu bulan.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 59. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kegiatan Laporan Keuangan dan BMN	112,90%	15.200.000	15.177.192	17.161.290,32	1.984.098
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				13,05%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{13,05\%}{20} \times 50 \right)$				82,63%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp15.177.192,00 atau 99,85% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 13,05% dan nilai efisiensi sebesar 82,63%.

**2. Sumber Daya Manusia**

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola BMN.

**h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yaitu pelaksanaan kegiatan laporan keuangan dan BMN yang merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

## **IKU 16 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)**

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Fokus penilaian dalam PMK tersebut bukan hanya besarnya penyerapan anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tetapi juga pada pencapaian output anggaran melalui :

- a. Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM;
- b. Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D; dan
- c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL?LKPP) (penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, memuat 13 (tiga belas) komponen adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran;
2. Data Kontrak;
3. Penyelesaian Tagihan;
4. Konfirmasi Capaian Output;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Revisi DIPA;
7. Deviasi Hal.3 DIPA;
8. LPJ Bendahara;
9. Renkas;
10. Kesalahan SPM;
11. Retur SP2D;
12. Pagu Minus;
13. Dispensasi.

Tabel 60. Capaian Indikator Kinerja “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

<b>SK 7</b>	<b>Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>IK 16</b>	<b>Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawanan</b>	
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
n/a	n/a	95,79	95,67	94,41	93,75	95,69	102,07	91	105,15

**a. Target dan Realisasi**

Capaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 sebesar 95,69 atau 102,07% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Pada Tahun 2019 belum terdapat indikator kinerja Nilai IKPA, sementara dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 mengalami penurunan. Capaian baru mengalami kenaikan pada Tahun 2023.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2023 memiliki persentase sebesar 105,15%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
93,75	95,69	102,07	93,75	96,15	102,56

Jika dibandingkan dengan capaian Nilai Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan PPN Pekalongan, capaian Indikator Kinerja “Nilai IKPA” PPN Kejawanan lebih rendah.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pengukuran dan pelaporan indikator kinerja ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi 13 (tiga belas) komponen yang terdapat pada monev PA pada aplikasi OM-SPAN. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini berhubungan dengan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 62. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor	102,07%	7.826.832.000	7.772.427.212	7.988.795.244	216.368.032
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				2,76%	

$= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{2,76\%}{20} \times 50 \right)$	56,91%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp7.772.427.212,00 atau 99,30% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 2,76% dan nilai efisiensi sebesar 56,91%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, didukung 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengelola Monev, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Mahir, serta 2 (dua) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

#### **IKU 17 - Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)**

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feedback) perbaikan (improve) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aplikasi ini dibangun dengan sistem *web-based*, digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Tabel 63. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

SK 7		Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan							
IK 16		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan							
Realisasi Tahun 2018 - 2022					Realisasi 2023			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
83,64	97,99	n/a	85,84	84,30	82	84,89	103,52	90	94,32

**a. Target dan Realisasi**

Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 sebesar 84,89 atau 103,52% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Tahun 2023 lebih tinggi dengan selisih nilai 0,59. Namun nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 dan 2021.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Persentase perbandingan dengan target dalam Renstra adalah 94,32%, yang berarti target pada Renstra lebih tinggi daripada realisasi capaian Tahun 2023.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
82	84,89	103,52	82	85,75	104,57

Perbandingan dengan satker lain belum dapat dilakukan karena pengukuran bersifat tahunan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi.

Faktor penghambat pencapaian NKA yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 65. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	103,52%	59.000.000	57.976.138	61.079.390	3.103.252
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				5,26%	

$= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{5,26\%}{20} \times 50 \right)$	63,15%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp57.976.138,00 atau 98,26% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 5,26% dan nilai efisiensi sebesar 63,15%.

## 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

#### IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 66. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023

<b>SK 7</b>	<b>Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>IK 16</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>								
<b>Realisasi Tahun 2018 - 2022</b>					<b>Realisasi 2023</b>			<b>Renstra PPN Kejawanan</b>	
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	88,21	90,43	102,52	n/a	-

**a. Target dan Realisasi**

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 sebesar 90,43 atau 102,52% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:  
 Pada tahun 2019-2022, tidak terdapat IKM terkait Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Tidak dapat membandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 dengan PPN Pekalongan

<b>PPN Kejawanan</b>			<b>PPN Pekalongan</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
88,21	90,43	102,52	88,21	90,05	102,09

Jika dibandingkan dengan PPN Pekalongan, realisasi capaian Nilai SKM PPN Kejawanan lebih tinggi dengan selisih persentase sebesar 0,43%.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Aplikasi sudah dibuat semudah mungkin, namun sebagian besar responden dalam pengisiannya perlu pendampingan oleh petugas, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali terkait prosedur pengisian pada aplikasi.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Review SOP Standar Pelayanan Pengukuran SKM	102,52%	16.360.000	15.973.394	16.771.736	798.342
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				4,88%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{4,88\%}{20} \times 50 \right)$				62,20%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp15.973.394,00 atau 97,64% dari alokasi anggaran Tahun 2023 dengan efisiensi 4,88% dan nilai efisiensi sebesar 62,20%.

**2. Sumber Daya Manusia**

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

#### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni Review SOP Standar Pelayanan Pengukuran SKM merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

### 3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2023, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp19.260.884.000,00 yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 69. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2023

KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	250.620.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	5.034.831.000
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	30.490.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.940.943.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp19.260.884.000,-</b>

Dari pagu anggaran tersebut diatas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2023 dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kegiatannya telah menargetkan sebesar Rp19.260.884.000,- dengan realisasi capaian anggaran sebesar Rp19.125.116.017,- atau 99,30% dari jumlah pagu Tahun 2023.

Tabel 70. Realisasi Keuangan PPN Kejawanan Tahun 2023

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2337	<b>Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan</b>	<b>250.620.000</b>	<b>249.644.537</b>	<b>99,61</b>
	ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	227.000.000	226.429.537	99,75
	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	10.420.000	10.406.000	99,87
	PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	13.200.000	12.809.000	97,04
2.	2338	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>	<b>5.034.831.000</b>	<b>4.988.789.778</b>	<b>99,09</b>
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	2.444.449.000	2.424.668.361	99,19
	BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	615.000.000	613.826.140	99,81
	RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1.775.382.000	1.752.285.522	98,70
	RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)	200.000.000	198.009.755	99,00
3.	2339	<b>Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.996.826</b>	<b>99,92</b>
	QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	4.000.000	3.996.826	99,92
4.	2341	<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>	<b>30.490.000</b>	<b>30.193.022</b>	<b>99,03</b>
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	30.490.000	30.193.022	99,03
5.	2342	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</b>	<b>13.940.943.000</b>	<b>13.852.491.854</b>	<b>99,37</b>
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	50.000.000	49.141.514	98,28
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	13.960.000	12.364.000	88,57
	EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	12.211.183.000	12.138.408.845	99,40
	EBB.951	Layanan Sarana Internal (Unit)	1.147.400.000	1.141.006.000	99,44
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	20.500.000	20.424.533	99,63
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	59.000.000	57.976.138	98,26
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	34.000.000	33.853.194	99,57
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	84.900.000	80.696.630	95,05
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	320.000.000	318.621.000	99,57

# BAB IV. PENUTUP

## 4. 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2023 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp19.260.884.000,- yang terealisasi sebesar Rp19.125.116.017,- atau 99,30% dari total pagu Tahun 2023. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 116,68%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi KinerjaJaku pada Gambar 4).



Gambar 4. Dashboard pada aplikasi KinerjaJaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Tahun 2023 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagai berikut :

1. IK1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan (Juta Rupiah)
2. IK2 – Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)
3. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
4. IK4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
5. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
6. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
7. IK7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
8. IK8 – Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

9. IK9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
11. IK11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK12 – Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
15. IK15 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
17. IK17 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

## 4. 2. Saran

Dengan tercapainya semua target IKU dan IKM pada Tahun 2023 diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di triwulan berikutnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Kejawanan secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPN Kejawanan Tahun 2023 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Semoga Laporan Kinerja PPN Kejawanan Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPN Kejawanan Tahun 2023 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Kejawanan di triwulan selanjutnya.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Agus Suherman

Pihak Pertama  
Kepala PPN Kejawanan

Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Juta Rupiah)	4.308,68
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	4.200
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	83
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	85
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	25
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,01
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	50
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	10
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,07
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	75
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	93
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	85
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	77,5
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	93,75
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	82
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	88,21		

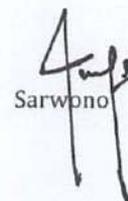
Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp5.489.841.000,-  
 2. Dukungan Manajemen Rp13.683.043.000,-  
 Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp19.172.884.000,-

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua  
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
 Agus Suherman

Pihak Pertama  
 Kepala PPN Kejawanan

  
 Sarwono







		Terlaksananya Penyampaian Surat - Surat dan Dokumen Dinas	3.000.000,00																	
17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dirjen Perikanan Tangkap	59.000.000,00	Nilai	82															82,00
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Review SOP Standar Pelayanan Pengukuran SKM	16.360.000,00	Indeks	88,21							82								88,21

Cirebon, 24 November 2023

Mengetahui





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO 1 CIREBON- 45113

TELEPON (0231) 210084

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) Surat Elektronik [ppn.kejawanan@kkp.go.id](mailto:ppn.kejawanan@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

**Nomor 17/KPA-PPNK/HK 510/II/2023**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA**

**SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

**MENIMBANG**

- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan,
- b bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2023,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

**MENINGAT**

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
- 5 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 23/MEN/2002 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program/Proyek Pembangunan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan,
- 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP 34/MEN-KP/KU 611/2022 tentang Perubahan Ketiga Puluhan Tujuh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 79/MEN/KU 611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- 8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-032 03 2 622482/2023 Tanggal 30 November 2022

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TAHUN ANGGARAN 2023
- PERTAMA** Menunjuk pegawai yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2023
- KEDUA** Tim Penyusun Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN  
NUSANTARA KEJAWANAN



SARWONO, A.Pi

NIP. 19750508 199803 1 004

LAMPIRAN

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor 17/KPA-PPNK/HK 510/I/2023 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2023

NO.	N A M A	JABATAN
1	Mohamad Yusuf Santoso, A Md, S Pi	Ketua
2	Sari Puspita, S Psi	Sekretaris
3	Ana Sholihah Nugraheni, A Md	Anggota
4	Novirman Robi Putra, S St Pi	Anggota
5	Farah Zhafirah, S Tr Pi	Anggota
6	Shandra Dewi Adresanty, S S T Pi	Anggota

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN  
NUSANTARA KEJAWANAN



SARWONO, A Pi  
NIP 19750508 199803 1 004